



## Mengelola Cadangan Pangan dalam Situasi Bencana: Adaptasi Pemerintah Daerah Pascagalodo Di Kabupaten Tanah Datar

<sup>1</sup>Alfisha Putri, <sup>2\*</sup>Rahmadani Yusran

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

<sup>2\*</sup>[yusranrdy@fis.unp.ac.id](mailto:yusranrdy@fis.unp.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received: 13<sup>th</sup> July 2026

Revised: 2<sup>nd</sup> September 2026

Accepted: 15<sup>th</sup> September 2026

#### Keywords:

Local government adaptation;  
galodo disaster; government food  
reserves; food distribution;  
government capacity

### ABSTRACT

*Disasters not only increase the food needs of affected communities but can also disrupt food management and distribution mechanisms that normally operate under stable conditions. This study analyzes the adaptation of local government in managing food reserves following the galodo disaster in Tanah Datar Regency. The study employed a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document analysis. Informants were purposively selected from the Food and Fisheries Agency, the Regional Disaster Management Agency, Perum Bulog, nagari governments, and disaster management experts. Data were analyzed interactively through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that food reserve management was carried out under conditions of limited stock availability, fiscal capacity, and disruptions to distribution infrastructure. The local government responded to these conditions through anticipatory stock management, the utilization of Unexpected Expenditures (Belanja Tidak Terduga) as an emergency financing mechanism, the mobilization of cross-sectoral actors, the development of temporary access routes, and the use of alternative distribution channels. The findings demonstrate that local government adaptation emerges when formal capacities and normal mechanisms come under pressure, making adjustments in resources, financing, and working procedures essential to maintaining food distribution functions. However, adaptive capacity does not eliminate structural problems, particularly stock gaps and limited local fiscal capacity. This study emphasizes that food reserve management in disaster situations cannot rely solely on the availability of food stocks. It also requires local government capacity to adjust working mechanisms in response to changing conditions, as well as strengthened fiscal capacity and distribution preparedness, so that food responses do not remain overly dependent on emergency mechanisms.*



This work is licensed under the Creative Commons  
Attribution-Share Alike 4.0 International License.  
©2026 by the author(s).

Corresponding Author:  
Rahmadani Yusran  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Negeri Padang,  
Email: [yusranrdy@fis.unp.ac.id](mailto:yusranrdy@fis.unp.ac.id)

## PENDAHULUAN

Bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga mengganggu berbagai sistem yang menopang kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu dampak yang sering muncul adalah terganggunya ketersediaan dan distribusi pangan. Kerusakan jalan, terputusnya akses transportasi, serta terbatasnya aktivitas ekonomi dapat menyebabkan pangan tersedia di suatu wilayah, tetapi sulit menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dalam kondisi tersebut, persoalan pangan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan produksi atau ketersediaan komoditas, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah memastikan distribusi tetap berjalan ketika mekanisme normal mengalami gangguan.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan salah satu instrumen untuk menghadapi kondisi tersebut. Di Indonesia, penyelenggaraan CPP diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Kebijakan ini menempatkan cadangan pangan sebagai persediaan yang dikelola pemerintah untuk menghadapi krisis pangan, termasuk yang disebabkan oleh bencana alam, gangguan distribusi, perubahan iklim, dan berbagai situasi lain yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pangan. Dalam konteks kebencanaan, keberadaan CPP tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah menyediakan stok pangan, tetapi juga kapasitas dalam mengelola dan menyalurkannya secara cepat sesuai kebutuhan darurat.

Namun, ketersediaan cadangan pangan tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Efektivitas pengelolaannya turut ditentukan oleh ketepatan perencanaan stok, kesiapan pembiayaan, koordinasi antarlembaga, serta kondisi infrastruktur dan akses transportasi. Ketika bencana merusak jalur distribusi atau menghambat mobilitas, pemerintah perlu menyesuaikan strategi penyaluran agar bantuan tetap dapat menjangkau wilayah terdampak. Dengan demikian, pengelolaan cadangan pangan dalam situasi bencana merupakan proses yang melibatkan aspek persediaan, kelembagaan, pembiayaan, dan operasional distribusi secara terpadu.

Permasalahan tersebut relevan dalam konteks bencana galodo di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang berdampak pada akses transportasi dan aktivitas masyarakat. Kerusakan infrastruktur menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam situasi ini, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak hanya berkaitan dengan jumlah persediaan yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menyesuaikan pemanfaatan stok, pembiayaan, koordinasi lintas sektor, dan jalur distribusi berdasarkan kondisi di lapangan. Pengalaman tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan cadangan pangan dilaksanakan ketika menghadapi keterbatasan sumber daya dan gangguan terhadap mekanisme distribusi normal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pengelolaan cadangan pangan pascagalodo di Kabupaten Tanah Datar penting dilakukan untuk memahami bentuk penyesuaian yang ditempuh pemerintah daerah dalam mempertahankan penyaluran pangan selama situasi darurat. Kajian ini berfokus pada pengelolaan persediaan, pemanfaatan dukungan pembiayaan, koordinasi antaraktor, serta strategi distribusi dalam menghadapi kerusakan infrastruktur. Melalui kajian tersebut, pengelolaan CPPD dapat dipahami tidak hanya sebagai upaya menyediakan cadangan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan distribusi pangan di tengah ketidakpastian bencana.

Persoalannya, keberadaan kebijakan dan stok cadangan pangan tidak selalu menjamin distribusi pangan dapat berlangsung secara efektif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) masih menghadapi berbagai kendala di tingkat

daerah, terutama dalam menjangkau masyarakat terdampak dan memastikan bantuan tersalurkan sesuai kebutuhan. Di Kota Sukabumi, distribusi bantuan pangan menghadapi hambatan dalam menjangkau wilayah yang terisolasi akibat bencana serta keterbatasan jenis bantuan yang diterima masyarakat (Hariadi et al., 2025). Di Kabupaten Tabalong, persoalan berkaitan dengan distribusi bantuan yang dinilai belum merata dan tepat sasaran (Jeny Saputri et al., 2025).

Selain persoalan distribusi, ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Agustian et al. (2022) menunjukkan bahwa perhitungan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya mengikuti formula yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan cadangan pangan tidak hanya membutuhkan ketersediaan persediaan, tetapi juga perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, persoalan CPP berkaitan erat dengan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di tengah keterbatasan sumber daya dan perubahan kondisi lapangan.

Persoalan serupa juga relevan dalam konteks Sumatera Barat. Penyelenggaraan cadangan pangan di provinsi ini telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjamin kecukupan pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan ketika menghadapi kondisi darurat maupun krisis. Keberadaan kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem cadangan pangan sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Namun, keberadaan kebijakan formal tetap perlu didukung oleh kecukupan persediaan dan kesiapan mekanisme penyaluran agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara efektif.

Data stok CPPD kabupaten dan kota di Sumatera Barat per 1 Mei 2025 menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ideal dan persediaan yang tersedia. Kebutuhan ideal CPPD tercatat sebesar 1.342.368 kg, sedangkan stok yang tersedia hanya 629.441 kg. Berdasarkan kedua angka tersebut, selisih kebutuhan dan persediaan adalah 712.927 kg. Angka ini berbeda dari defisit sebesar 693.518 kg yang tercantum dalam naskah awal, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap data sumber sebelum digunakan dalam publikasi. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas cadangan pangan daerah masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ideal.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pengelolaan CPPD di Sumatera Barat tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah menyediakan persediaan yang memadai dan memastikan distribusi dapat berlangsung ketika terjadi bencana. Kesenjangan antara kebutuhan ideal dan stok yang tersedia menjadi semakin penting ketika wilayah menghadapi bencana yang merusak infrastruktur serta menghambat akses transportasi.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang mengalami kondisi tersebut. Dengan kebutuhan ideal CPPD sebesar 97.872 kg, stok yang tersedia tercatat hanya 22.220 kg atau mengalami kekurangan sebesar 75.652 kg. Persoalan kapasitas stok menjadi semakin penting ketika daerah menghadapi bencana galodo yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu akses menuju sejumlah wilayah terdampak. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan jumlah cadangan pangan, tetapi juga dengan persoalan bagaimana pangan dapat disalurkan ketika jalan dan jembatan yang selama ini menopang jalur distribusi tidak dapat digunakan.

Kondisi pascagalodo memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan cadangan pangan berlangsung dalam situasi yang tidak sepenuhnya dapat ditangani melalui mekanisme

pemerintahan normal. Keterbatasan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memengaruhi kapasitas pengadaan stok dan pembiayaan distribusi. Pada saat yang sama, kerusakan infrastruktur menghambat akses menuju masyarakat terdampak. Pemerintah daerah karena itu dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan sumber pembiayaan, mengelola ketersediaan stok secara lebih selektif, mengaktifkan koordinasi lintas aktor, dan mencari jalur distribusi alternatif. Respons tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan cadangan pangan dalam situasi bencana bukan sekadar persoalan menjalankan prosedur kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah beradaptasi terhadap perubahan kondisi di lapangan.

Kajian mengenai implementasi kebijakan cadangan pangan selama ini telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan kelembagaan dan sumber daya. Kurnia et al (2020) menyoroti koordinasi dan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan Hariadi, et al (2025) membahas ketersediaan CPPD dan persoalan distribusi. Gunawan, et al. (2024) memberikan perhatian pada faktor koordinasi, sementara Zulaeha, et al (2024) menempatkan kewenangan pemerintah sebagai bagian penting dalam pengelolaan cadangan pangan. Agustian, et al (2022), pada sisi lain, mengkaji penguatan cadangan pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat. Meskipun memberikan pemahaman mengenai berbagai kendala implementasi, kajian tersebut cenderung melihat keterbatasan kebijakan sebagai persoalan yang harus diperbaiki dalam mekanisme implementasi yang telah tersedia.

Perhatian terhadap pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) masih perlu diperluas, khususnya dalam memahami bagaimana pemerintah daerah merespons kondisi ketika keterbatasan kapasitas fiskal, stok pangan, dan kerusakan infrastruktur terjadi secara bersamaan. Situasi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan pangan, tetapi juga memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak meskipun sumber daya dan akses distribusi terbatas.

Dalam kondisi tersebut, implementasi kebijakan berlangsung melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan oleh aktor pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan distribusi pangan. Penyesuaian tersebut dapat mencakup pemanfaatan sumber pembiayaan darurat, pengelolaan stok secara antisipatif, mobilisasi aktor lintas sektor, serta perubahan jalur distribusi sesuai dengan kondisi di lapangan. Berbagai tindakan ini menjadi bagian penting dari praktik pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian dan keterbatasan selama bencana.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan cadangan pangan perlu dikaji tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan formal atau ketersediaan stok, tetapi juga melalui kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam mengatasi gangguan. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana pemerintah menyesuaikan sumber daya, pembiayaan, koordinasi, dan mekanisme distribusi untuk mempertahankan fungsi pelayanan pangan dalam situasi darurat. Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan CPPD pascagalodo di Kabupaten Tanah Datar penting untuk memahami bentuk adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah beserta tantangan yang masih dihadapi.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis adaptasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) pascabencana galodo. Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan distribusi pangan ketika menghadapi keterbatasan sumber daya dan gangguan terhadap mekanisme pemerintahan normal.

Secara khusus, penelitian ini menelusuri bagaimana pemerintah daerah merespons keterbatasan anggaran dan stok pangan serta mengatasi hambatan distribusi akibat kerusakan infrastruktur. Perhatian juga diarahkan pada berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam

pengelolaan persediaan, pemanfaatan pembiayaan darurat, koordinasi lintas sektor, dan pengaturan jalur distribusi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika implementasi kebijakan cadangan pangan ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan dan keterbatasan akibat bencana. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam mempertahankan penyaluran pangan kepada masyarakat terdampak serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diperhatikan dalam penguatan pengelolaan cadangan pangan pada masa mendatang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2022) untuk menganalisis adaptasi pemerintah daerah dalam mengelola cadangan pangan pascabencana galodo di Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman, pengambilan keputusan, dan penyesuaian yang dilakukan aktor pemerintah dalam menghadapi keterbatasan anggaran, stok pangan, serta gangguan distribusi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi utama, dengan melibatkan BPBD Kabupaten Tanah Datar, Perum Bulog, dan pemerintahan nagari terdampak untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan dan distribusi pangan.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta distribusi cadangan pangan. Informan meliputi Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, pejabat BPBD, pihak Perum Bulog, aparat pemerintah nagari, dan pakar kebencanaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan pemerintah daerah, serta data cadangan pangan. Wawancara difokuskan pada pengelolaan stok, pembiayaan darurat, koordinasi antaraktor, kendala yang dihadapi, dan penyesuaian jalur distribusi menuju wilayah terdampak.

Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah serta respons adaptif yang dilakukan, terutama dalam aspek pembiayaan, pengelolaan stok, koordinasi lintas sektor, dan distribusi pangan. Informasi dari berbagai informan dibandingkan dengan dokumen yang diperoleh untuk memeriksa konsistensi data dan memperkuat interpretasi. Melalui proses tersebut, penelitian berupaya menjelaskan pola adaptasi pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi distribusi pangan di tengah keterbatasan dan gangguan akibat bencana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan cadangan pangan pascagalodo di Kabupaten Tanah Datar berlangsung dalam kondisi kapasitas daerah yang terbatas. Persoalan tersebut terutama terlihat dari kesenjangan antara kebutuhan ideal cadangan pangan dan stok yang tersedia. Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menunjukkan bahwa kebutuhan ideal Kabupaten Tanah Datar mencapai 97.872 kg, sedangkan stok yang tersedia hanya 22.220 kg. Dengan demikian, terdapat kekurangan sebesar 75.652 kg. Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada situasi yang tidak mudah ketika kebutuhan pangan meningkat saat bencana. Keterbatasan stok tersebut berkaitan erat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah karena pengadaan CPPD masih bergantung pada alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara ruang fiskal yang tersedia tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan cadangan pangan ideal.

Tinjauan sistematis terhadap ketahanan sistem pasokan pangan menunjukkan bahwa ketahanan tidak cukup dibangun melalui penyediaan persediaan, tetapi memerlukan kombinasi kapasitas, strategi penyangga, diversifikasi, dan dukungan tata kelola yang sesuai dengan jenis gangguan yang dihadapi (Huang et al., 2025). Sejalan dengan itu, kajian mengenai pengelolaan rantai pasok pangan dalam situasi bencana menegaskan bahwa bencana dapat memperlihatkan kerentanan yang kurang terlihat dalam kondisi operasional normal, terutama berkaitan dengan akses, aliran pasokan, dan koordinasi distribusi (Perdana et al., 2022). Dalam konteks Tanah Datar, defisit stok tersebut tidak hanya menunjukkan persoalan kuantitas cadangan pangan, tetapi juga menggambarkan terbatasnya kapasitas penyangga ketika terjadi peningkatan kebutuhan secara mendadak. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah menghadapi bencana turut dipengaruhi oleh kecukupan cadangan sebelum bencana terjadi.

Dinamika keterbatasan tersebut terlihat dari perubahan jumlah stok CPPD Kabupaten Tanah Datar sepanjang tahun 2024. Pengadaan yang dilakukan pemerintah daerah memang meningkatkan jumlah cadangan pangan yang tersedia, tetapi kebutuhan penyaluran dalam situasi bencana kembali mengurangi stok yang telah dibentuk. Kondisi ini memperlihatkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan pengadaan, penyaluran, dan pemeliharaan cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Ketika stok yang tersedia harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kapasitas cadangan yang masih tersisa agar tetap memiliki sumber daya untuk menghadapi keadaan darurat berikutnya.

Oleh karena itu, pengelolaan CPPD perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan stok ideal, tetapi juga pada keberlanjutan ketersediaan cadangan dalam menghadapi ketidakpastian bencana. Ketergantungan pada APBD dan berkurangnya stok setelah penyaluran menunjukkan pentingnya perencanaan pengadaan yang mempertimbangkan tingkat risiko bencana, kebutuhan distribusi, serta mekanisme pengisian kembali cadangan setelah digunakan. Penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar pemerintah daerah tidak hanya mampu merespons kebutuhan pangan saat bencana berlangsung, tetapi juga mempertahankan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana berikutnya. Dengan demikian, kecukupan stok, keberlanjutan pembiayaan, dan perencanaan penyaluran perlu ditempatkan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam memperkuat ketahanan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Tanah Datar. Perubahan jumlah cadangan pangan sebelum pengadaan, setelah pengadaan, dan setelah penyaluran ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1: Dinamika Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024**

| Jenis Pangan | Stok Awal | Pengadaan | Total Stok | Disalurkan Saat Bencana | Sisa Stok |
|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| Beras        | 16 ton    | 30 ton    | 46 ton     | 25 ton                  | 21 ton    |

**Sumber:** Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, pengadaan sebanyak 30 ton meningkatkan cadangan beras Kabupaten Tanah Datar dari 16 ton menjadi 46 ton. Namun, penyaluran sebanyak 25 ton dalam situasi bencana menyebabkan stok yang tersisa turun menjadi 21 ton. Perubahan ini

menunjukkan bahwa kapasitas cadangan pangan daerah bersifat dinamis dan dapat berkurang secara signifikan ketika pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan cadangan pangan tidak hanya terletak pada jumlah persediaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengelola stok yang terbatas di tengah ketidakpastian bencana. Pengadaan pangan dapat meningkatkan kapasitas persediaan, tetapi kebutuhan penyaluran dalam situasi darurat dapat mengurangi stok dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat saat ini dan ketersediaan cadangan untuk menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Pascagalodo, pemerintah daerah tidak serta-merta menyalurkan seluruh cadangan yang dimiliki. Masuknya bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari pemerintah pusat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan sebagian stok sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan bencana susulan. Keputusan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan dalam mengelola persediaan di tengah keterbatasan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus menjaga kesiapan cadangan pangan untuk menghadapi kondisi darurat berikutnya. Seorang pejabat Dinas Pangan dan Perikanan menjelaskan:

*“...dalam penyaluran kemaren, Tanah Datar mengeluarkan 5 ton beras. Hal ini dilaksanakan karena adanya bantuan CPP pusat yang masuk sehingga daerah mengantisipasi dahulu apabila ada bencana susulan, mengingat juga jumlah stok CPP daerah juga tidak banyak.”*

(Wawancara, 8 April 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyaluran cadangan pangan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketersediaan stok dan potensi kebutuhan pada masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan sebanyak 5 ton beras karena adanya bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari pemerintah pusat yang masuk. Meskipun bantuan tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan pangan saat bencana, pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana susulan. Pertimbangan ini menjadi penting karena jumlah stok CPPD yang dimiliki daerah masih terbatas. Dengan demikian, keputusan penyaluran tidak hanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat saat itu, tetapi juga pada upaya menjaga ketersediaan cadangan agar pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan untuk merespons kebutuhan pangan apabila terjadi bencana berikutnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan stok mendorong pemerintah daerah menerapkan pengelolaan cadangan pangan secara antisipatif, yaitu dengan menyeimbangkan kebutuhan penyaluran saat ini dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Keputusan untuk membatasi penggunaan CPPD menunjukkan adanya perubahan dalam cara stok pangan dikelola pada situasi darurat. Pemerintah daerah tidak hanya merespons kebutuhan pangan yang sedang berlangsung, tetapi juga mempertimbangkan ketidakpastian setelah bencana. Dalam konteks ini, cadangan pangan diperlakukan sebagai sumber daya strategis yang harus dijaga agar pemerintah tetap memiliki kapasitas merespons apabila terjadi gangguan berikutnya. Hal ini sejalan dengan Lassa et al. (2019), yang menjelaskan bahwa cadangan pangan darurat berfungsi sebagai penyangga untuk menghadapi guncangan akibat bencana dan ketidakpastian iklim. Cara pemerintah mengelola stok tersebut memperlihatkan adanya dilema dalam penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat daerah. Di satu sisi, pangan harus segera

disalurkan kepada masyarakat terdampak. Di sisi lain, keterbatasan stok menuntut pemerintah mempertahankan sebagian cadangan untuk menghadapi risiko yang belum dapat diprediksi. Ketahanan pasokan pangan menekankan bahwa ketahanan muncul dari konfigurasi berbagai kapasitas bukan dari satu instrumen seperti stok penyangga saja dan bahwa respon sistem sering kali berbeda menurut karakter gangguan (Huang, et al, 2025). Karena itu, pengelolaan stok perlu disertai kriteria prioritas penyaluran, pemantauan kebutuhan, dan rencana pengisian kembali setelah bantuan dikeluarkan. Dengan demikian, keputusan distribusi tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi melibatkan pertimbangan mengenai kebutuhan saat ini dan kesiapan menghadapi kemungkinan krisis berikutnya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan stok cadangan pangan tidak hanya menjadi persoalan kapasitas dalam implementasi kebijakan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan penggunaan sumber daya yang tersedia. Hariadi et al. (2025), misalnya, menyoroti keterbatasan cadangan pangan dan distribusi sebagai kendala dalam pencapaian kebijakan, sedangkan Agustian et al. (2022) menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan cadangan pangan daerah dan kapasitas penyediaannya. Dalam kasus Tanah Datar, kondisi tersebut tercermin dari keterbatasan stok yang mendorong pemerintah mengambil keputusan secara lebih antisipatif, termasuk mempertimbangkan kebutuhan penyaluran saat ini dan kemungkinan terjadinya bencana susulan. Dengan demikian, adaptasi pemerintah daerah justru muncul ketika kapasitas sumber daya belum memadai dan pemerintah harus mempertahankan fungsi distribusi di tengah keterbatasan. Namun, adaptasi tersebut tidak cukup dinilai hanya dari kemampuan mengelola stok, karena efektivitas penanganan bencana juga ditentukan oleh kemampuan memastikan pangan dapat diakses oleh masyarakat terdampak. Hal ini sejalan dengan Hecht et al. (2019), yang menekankan pentingnya perencanaan darurat dan ketersediaan alternatif infrastruktur untuk menjaga ketahanan sistem pangan, serta Huang et al. (2025), yang menunjukkan bahwa ketahanan sistem pangan bergantung pada kombinasi kapasitas dan kemampuan beradaptasi terhadap guncangan.

Ketersediaan pangan tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat apabila kerusakan infrastruktur menghambat distribusi dan wilayah terdampak sulit dijangkau. Dalam situasi bencana, keberhasilan penyaluran pangan tidak hanya bergantung pada jumlah stok yang tersedia, tetapi juga pada kondisi akses transportasi dan kemampuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, hambatan distribusi dapat menjadi persoalan penting meskipun cadangan pangan masih tersedia.

Hal ini sejalan dengan temuan Bulkis et al. (2026) mengenai pentingnya kapasitas kelembagaan, koordinasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan data dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah rawan krisis di Indonesia. Faktor-faktor tersebut berperan dalam mendukung pengambilan keputusan, menghubungkan sumber daya antarlembaga, dan memastikan penyaluran pangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan cadangan pangan memerlukan keterpaduan antara ketersediaan stok dan kesiapan sistem distribusi dalam menghadapi gangguan akibat bencana.

Dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, pengelolaan cadangan pangan perlu dipahami secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan jumlah stok yang tersedia, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah daerah mengoordinasikan sumber daya, mengatasi hambatan distribusi, dan menyalurkan pangan secara tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan. Kerusakan infrastruktur dan keterbatasan akses menunjukkan pentingnya kesiapan jalur distribusi alternatif serta koordinasi lintas aktor dalam situasi darurat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan cadangan pangan daerah perlu mencakup perencanaan stok, kesiapan infrastruktur distribusi, dukungan

pembiayaan, dan mekanisme koordinasi yang mampu menjaga keberlanjutan penyaluran pangan ketika bencana terjadi.

**a. Dari APBD ke Pembiayaan Darurat: Adaptasi Fiskal dalam Situasi Bencana**

Keterbatasan fiskal tidak hanya memengaruhi pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), tetapi juga pembiayaan distribusi pangan pascabencana. Dalam kondisi normal, pengelolaan cadangan pangan bergantung pada anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, setelah galodo, kebutuhan distribusi pangan meningkat secara cepat, sementara anggaran reguler yang tersedia belum tentu mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional dalam situasi darurat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan mekanisme pembiayaan agar penyaluran pangan kepada masyarakat terdampak tetap dapat berlangsung.

Situasi tersebut sejalan dengan temuan Wiyanti dan Halimatussadiah (2022), yang menunjukkan bahwa bencana dapat menekan keseimbangan fiskal pemerintah daerah melalui penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran, termasuk belanja tidak terduga. Dalam konteks pengelolaan CPPD di Kabupaten Tanah Datar, tekanan fiskal menjadi tantangan karena pemerintah perlu memenuhi kebutuhan distribusi pangan sekaligus mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, kesiapan pembiayaan darurat menjadi aspek penting untuk mendukung keberlanjutan distribusi pangan ketika bencana mengganggu mekanisme penganggaran dan operasional normal.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai alternatif pembiayaan untuk mendukung kebutuhan distribusi pangan darurat. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan BTT mensyaratkan adanya Surat Keputusan (SK) tanggap darurat dan hanya dapat dilakukan selama status tersebut masih berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pembiayaan dalam situasi bencana tetap bergantung pada persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan distribusi pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan mengakses dan menggunakan sumber pembiayaan darurat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Meskipun BTT membantu menjembatani keterbatasan anggaran reguler, mekanisme tersebut lebih berfungsi sebagai instrumen pembiayaan untuk merespons kebutuhan mendesak dan belum menyelesaikan persoalan keterbatasan anggaran pengadaan CPPD secara struktural. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan anggaran reguler agar pengadaan dan pengisian kembali cadangan pangan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat saat bencana dan kesiapan stok dalam menghadapi kemungkinan bencana susulan. Dengan demikian, fleksibilitas pembiayaan darurat perlu didukung oleh perencanaan fiskal jangka panjang agar pengelolaan cadangan pangan daerah tidak terus bergantung pada mekanisme respons darurat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menjelaskan:

*“...untuk anggaran kemaren kita bisa mengajukan dana BTT, dana BTT tersebut dapat digunakan dengan syarat adanya SK tanggap darurat dan penggunaan dana BTT itu bisa dipakai selama SK tanggap darurat masih berlaku.”*

(Wawancara, 8 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai alternatif pembiayaan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana, termasuk distribusi pangan. Namun, penggunaan dana tersebut mensyaratkan adanya Surat Keputusan (SK) tanggap darurat dan hanya dapat dilakukan selama masa berlaku SK tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas pembiayaan darurat tetap terikat pada persyaratan administratif yang berlaku. Dengan demikian, keberlangsungan pembiayaan distribusi pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada penetapan status tanggap darurat sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengakses dan menggunakan dana BTT sesuai kebutuhan penanganan bencana.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa pemerintah daerah memanfaatkan fleksibilitas dalam sistem anggaran untuk merespons keterbatasan fiskal tanpa meninggalkan mekanisme formal pemerintahan. Penetapan status tanggap darurat menjadi dasar administratif bagi penggunaan pembiayaan darurat untuk memenuhi kebutuhan operasional pascabencana, termasuk mempertahankan distribusi pangan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas adaptasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengaktifkan sumber pembiayaan secara cepat ketika kebutuhan berubah. Penelitian Wicaksana dan Azhar (2025) menunjukkan bahwa alokasi belanja tidak terduga pemerintah daerah di Indonesia tidak sepenuhnya ditentukan oleh ketergantungan fiskal dan tingkat risiko bencana, sehingga faktor lain dalam pengambilan keputusan anggaran juga perlu diperhatikan. Sementara itu, Haris et al. (2023) menemukan bahwa indeks risiko bencana berhubungan positif dengan alokasi dana tanggap darurat, meskipun penganggaran pemerintah daerah masih lebih berorientasi pada respons darurat dibandingkan pencegahan. Sejalan dengan itu, Wiyanti dan Halimatussadiah (2022) menunjukkan bahwa bencana dapat menekan keseimbangan fiskal daerah melalui peningkatan pengeluaran, termasuk belanja tidak terduga.

Meskipun membantu menjembatani kesenjangan antara anggaran reguler dan kebutuhan mendesak, penggunaan BTT tetap bergantung pada pengakuan formal atas kondisi darurat serta ketentuan administratif yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme ini efektif sebagai instrumen respons jangka pendek, tetapi belum menyelesaikan persoalan struktural berupa keterbatasan pembiayaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena, sebagaimana disoroti oleh Bulkis et al. (2026), ketergantungan pemerintah lokal, lemahnya koordinasi, keterlambatan anggaran, dan kesenjangan data dapat menghambat keterhubungan antarlembaga dalam tata kelola ketahanan pangan. Dalam konteks Tanah Datar, hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pembiayaan darurat yang cepat dan akuntabel, sekaligus penguatan perencanaan anggaran reguler agar kapasitas CPPD lebih memadai. Kesadaran terhadap kebutuhan tersebut tercermin dalam rencana pemerintah daerah untuk kembali memperkuat stok pangan, sehingga penanganan bencana tidak hanya bergantung pada fleksibilitas anggaran darurat, tetapi juga didukung oleh kesiapan cadangan pangan yang lebih berkelanjutan. Seorang informan dari Dinas Pangan dan Perikanan menyatakan:

*“...karena telah dilaksanakan penyaluran, dinas akan mengajukan lagi anggaran untuk pengadaan lagi di tahun 2026, dinas akan membeli beras untuk CPP 100 ton melalui dana APBD.”*

(Wawancara, 13 April 2026)

Hasil wawancara di atas menunjukkan adanya upaya pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memulihkan dan memperkuat ketersediaan cadangan pangan setelah penyaluran dilakukan selama masa bencana. Pemerintah daerah berencana mengajukan kembali anggaran pengadaan beras pada tahun 2026 dengan target sebanyak 100 ton melalui APBD. Rencana ini mencerminkan kesadaran bahwa penyaluran cadangan pangan perlu diikuti dengan pengisian kembali stok agar kapasitas daerah dalam menghadapi keadaan darurat tetap terjaga. Namun, realisasi pengadaan tersebut tetap bergantung pada proses pengajuan dan ketersediaan anggaran daerah. Dengan demikian, perencanaan pengadaan kembali menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan cadangan pangan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.

Rencana pengadaan tersebut menunjukkan adanya upaya menghubungkan respons darurat dengan kesiapan menghadapi risiko berikutnya. Meskipun demikian, ketergantungan kembali pada APBD memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal tetap menjadi persoalan mendasar dalam pengelolaan CPPD. Adaptasi fiskal melalui BTT mampu menjaga fungsi distribusi ketika krisis berlangsung, tetapi belum menggantikan kebutuhan akan kapasitas pembiayaan cadangan pangan yang lebih berkelanjutan.

#### **b. Ketika Infrastruktur Terputus: Mobilisasi Aktor dan Rekonfigurasi Distribusi**

Galodo mengubah kondisi fisik yang selama ini menopang distribusi pangan di Kabupaten Tanah Datar. Jalan dan jembatan yang terputus menyebabkan sejumlah wilayah terdampak sulit dijangkau melalui jalur distribusi yang biasa digunakan. Dalam situasi tersebut, keberadaan stok pangan tidak secara otomatis menjamin bantuan dapat diterima masyarakat karena aksesibilitas jaringan transportasi turut menentukan efektivitas distribusi bantuan (Rojas Trejos et al., 2023). Persoalan utama bergeser dari ketersediaan pangan menuju kemampuan pemerintah dan aktor lapangan mempertahankan akses distribusi. Kondisi tersebut terlihat pada akses menuju Nagari Sungai Jambu. Kerusakan jembatan dari arah Lima Kaum dan Parambahan menyebabkan proses distribusi bantuan mengalami hambatan. Seorang pejabat BPBD Kabupaten Tanah Datar menjelaskan:

*“...jalan dan jembatan kan banyak yang putus jadi kami kesulitan menjangkau wilayah-wilayah yang terdampak seperti ke Nagari Sungai Jambu, akses dari Lima Kaum jembatan putus, dari Parambahan juga putus...”*  
(Wawancara, 13 Mei 2026)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur akibat galodo menjadi salah satu kendala utama dalam penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Tanah Datar. Terputusnya jalan dan jembatan menyebabkan akses menuju sejumlah wilayah terdampak, khususnya Nagari Sungai Jambu, mengalami hambatan. Kerusakan jembatan dari arah Lima Kaum maupun Parambahan semakin menyulitkan pemerintah dan aktor di lapangan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketersediaan cadangan pangan saja belum cukup untuk menjamin kelancaran distribusi apabila akses transportasi terganggu.

Gangguan distribusi pangan akibat galodo di Kabupaten Tanah Datar tidak ditangani oleh satu organisasi secara terpisah, tetapi melalui keterlibatan berbagai aktor yang bekerja sama sesuai kebutuhan di lapangan. BPBD bersama masyarakat, TNI, Polri, dan relawan melakukan pembersihan material galodo serta membangun jembatan darurat untuk membuka kembali akses

menuju titik pengungsian. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan hambatan distribusi membutuhkan mobilisasi sumber daya dan kerja sama lintas sektor, terutama ketika kerusakan infrastruktur menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Berdasarkan data lapangan, koordinasi lintas aktor berlangsung melalui tindakan langsung untuk menyelesaikan persoalan akses dan distribusi. Keterlibatan BPBD, masyarakat, TNI, Polri, dan relawan memperlihatkan bahwa koordinasi dalam situasi darurat tidak hanya berlangsung melalui mekanisme administratif antarlembaga, tetapi juga melalui kerja bersama untuk merespons kebutuhan mendesak. Pembagian peran berkembang mengikuti kondisi dan persoalan yang dihadapi di lapangan, sehingga kemampuan pemerintah mempertahankan distribusi pangan turut bergantung pada kemampuannya memobilisasi sumber daya dari berbagai pihak.

Upaya membuka kembali akses melalui pembersihan material dan pembangunan jembatan darurat menjadi langkah penting untuk mengatasi gangguan logistik pascabencana. Hal ini sejalan dengan Tarei et al. (2024), yang membahas hambatan logistik kemanusiaan, termasuk kesulitan menjangkau wilayah terdampak dan kendala pengiriman bantuan hingga ke penerima. Dengan demikian, pemulihan akses tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, tetapi juga dengan upaya memastikan bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Selain membangun akses sementara, pemerintah dan aktor lokal juga menyesuaikan jalur distribusi dengan memanfaatkan rute alternatif melalui Nagari Labuah karena wilayah tersebut tidak terdampak galodo dan masih dapat dilalui. Langkah ini menunjukkan bahwa distribusi pangan tetap diupayakan melalui penyesuaian terhadap kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur. Strategi tersebut sejalan dengan kajian Wang et al. (2026) dan Zhang et al. (2026), yang menekankan pentingnya pengaturan rute, penempatan persediaan, dan pemanfaatan jaringan transportasi dalam perencanaan logistik kemanusiaan. Oleh karena itu, kesiapan jalur alternatif dan koordinasi lintas aktor perlu menjadi bagian dari perencanaan distribusi pangan untuk menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Sekretaris Nagari Parambahan menjelaskan:

*“...jalan melewati Nagari Labuah juga bisa dilewati sebab disana tidak terkena galodo, jadi bantuan yang datang bisa juga lewat Labuah kemaren itu.”*  
(Wawancara, 9 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Nagari Labuah menjadi jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan pascabencana karena wilayah tersebut tidak terdampak galodo sehingga akses jalan masih dapat dilalui. Kondisi ini memungkinkan bantuan logistik tetap dikirimkan kepada masyarakat terdampak meskipun jalur utama mengalami gangguan. Pemanfaatan jalur alternatif tersebut mencerminkan upaya adaptasi dalam distribusi bantuan dengan menyesuaikan kondisi aksesibilitas di lapangan. Dengan demikian, ketersediaan jalur yang masih dapat dilalui menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran penyaluran bantuan ketika infrastruktur di wilayah terdampak mengalami kerusakan.

Penggunaan jalur alternatif melalui Nagari Labuah dan pembangunan jembatan darurat menunjukkan upaya pemerintah daerah bersama berbagai aktor di lapangan untuk mempertahankan kelancaran distribusi pangan dengan menyesuaikan strategi operasional terhadap kondisi pascabencana. Ketika jalur utama tidak dapat digunakan akibat kerusakan infrastruktur, penyesuaian rute menjadi langkah praktis untuk menjaga akses menuju wilayah terdampak. Pemanfaatan jalur melalui Nagari Labuah, yang tidak terkena galodo dan masih dapat dilalui, memungkinkan bantuan tetap disalurkan meskipun akses pada jalur utama mengalami gangguan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan distribusi pangan tidak hanya bergantung pada kesiapan prosedur dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan memahami perubahan kondisi, mengambil keputusan secara cepat, dan mengoordinasikan tindakan lintas organisasi. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, masyarakat, dan relawan menjadi modal penting dalam membuka akses serta mendukung penanganan bencana. Namun, sebagaimana dibahas oleh Astuti et al. (2026), fragmentasi tata kelola, lemahnya kapasitas lokal, dan ketidakkonsistenan implementasi kebijakan dapat membatasi efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, keterlibatan banyak aktor perlu didukung oleh pembagian peran yang jelas, pertukaran informasi, kejelasan komando, dan koordinasi sumber daya agar respons dapat berjalan secara efektif.

Sejalan dengan kajian Saputra et al. (2026), keberadaan lembaga dan sumber daya saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan respons bencana. Kapasitas tersebut perlu diwujudkan melalui prosedur kerja yang jelas, koordinasi lintas organisasi, sistem informasi, latihan bersama, dan evaluasi pascabencana. Dalam kasus Tanah Datar, kerja sama antaraktor, pembangunan jembatan darurat, dan penggunaan jalur alternatif memperlihatkan adanya penyesuaian operasional untuk mengatasi hambatan akses. Langkah-langkah tersebut menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan respons bencana, terutama ketika kerusakan infrastruktur menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, temuan ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pola koordinasi tersebut telah terlembaga secara permanen. Diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen rencana kontingensi, prosedur operasi, dan hasil evaluasi pascabencana untuk mengetahui sejauh mana pengalaman tersebut telah diintegrasikan ke dalam sistem kesiapsiagaan pemerintah daerah. Selain itu, Perdana et al. (2022) menekankan pentingnya memperhatikan seluruh tahapan rantai pasok, mulai dari pengadaan dan penyimpanan hingga transportasi dan akses penerima. Dengan demikian, distribusi pangan perlu dipahami sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan, bukan sekadar kegiatan menyalurkan persediaan yang telah tersedia.

Berdasarkan temuan tersebut, keberhasilan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Tanah Datar tidak cukup diukur dari jumlah stok yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan memastikan pangan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan meskipun akses transportasi terganggu. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pemetaan rute alternatif, penentuan titik distribusi sementara, perencanaan kebutuhan transportasi, serta penetapan prioritas bagi wilayah yang paling sulit dijangkau. Langkah-langkah tersebut perlu menjadi bagian dari perencanaan kesiapsiagaan agar pemerintah daerah memiliki pilihan operasional ketika jalur utama terputus. Dengan demikian, pengalaman pascagalodo di Tanah Datar dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat ketahanan distribusi pangan dan meningkatkan kesiapan menghadapi bencana berikutnya.

### **c. Adaptasi Pemerintah Daerah sebagai Praktik Mempertahankan Fungsi Kebijakan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan cadangan pangan pascagalodo di Kabupaten Tanah Datar berlangsung melalui serangkaian penyesuaian ketika mekanisme normal menghadapi tekanan. Penyesuaian tersebut mencakup pengelolaan stok secara selektif, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), mobilisasi aktor lintas sektor, pembangunan akses darurat, dan penggunaan jalur distribusi alternatif. Pada tingkat sumber daya, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan penyaluran pangan saat ini dengan keperluan mempertahankan stok untuk mengantisipasi bencana susulan. Pada tingkat fiskal, BTT dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran reguler dalam memenuhi kebutuhan distribusi darurat, sedangkan pada

tingkat operasional, pemerintah bersama aktor di lapangan berupaya memulihkan akses dan menyesuaikan jalur distribusi ketika infrastruktur utama tidak dapat digunakan.

Pola penyesuaian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan cadangan pangan dalam situasi bencana tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan persediaan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan, anggaran, dan tindakan operasional terhadap perubahan kondisi di lapangan. Pengelolaan stok secara selektif menunjukkan adanya pertimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini dan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana susulan. Sementara itu, pemanfaatan BTT serta kerja sama lintas sektor mendukung pelaksanaan respons darurat ketika mekanisme reguler menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan cadangan pangan turut ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan sumber daya, dukungan fiskal, dan koordinasi operasional.

Pola tersebut sejalan dengan Ledoh et al. (2026), yang menunjukkan bahwa tata kelola adaptif memungkinkan pemerintah daerah dengan sumber daya terbatas menyesuaikan perencanaan dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi perubahan kondisi bencana. Selain itu, Zhang (2021) menegaskan pentingnya mempertimbangkan kapasitas persediaan dan kemampuan respons dalam merancang strategi penyediaan cadangan kebutuhan darurat. Kedua kajian tersebut memperkuat temuan bahwa pengelolaan cadangan pangan perlu dirancang tidak hanya berdasarkan kebutuhan normal, tetapi juga dengan mempertimbangkan ketidakpastian bencana, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan penyesuaian dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, pengalaman Kabupaten Tanah Datar menunjukkan pentingnya mengintegrasikan perencanaan stok, fleksibilitas pembiayaan, dan kesiapan distribusi untuk mendukung keberlanjutan penyaluran pangan dalam situasi darurat.

Menariknya, berbagai bentuk adaptasi dalam pengelolaan cadangan pangan pascagalodo di Kabupaten Tanah Datar tidak muncul sebagai hasil dari desain kebijakan baru yang secara khusus dirumuskan setelah bencana, melainkan berkembang melalui tindakan para aktor pemerintah dan jaringan pelaksana dalam merespons persoalan konkret di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam situasi bencana bersifat dinamis karena keberlangsungan pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kemampuan aktor menyesuaikan sumber daya, pembiayaan, dan mekanisme distribusi sesuai dengan perubahan kondisi. Dalam kasus Tanah Datar, keterbatasan yang dihadapi tidak serta-merta menghentikan implementasi kebijakan, tetapi mendorong munculnya berbagai praktik penyesuaian untuk mempertahankan penyaluran pangan kepada masyarakat terdampak.

Temuan tersebut sejalan dengan Ismail et al. (2025), yang menjelaskan bahwa diskresi pelaksana kebijakan di tingkat lapangan dapat menjadi kapasitas adaptif untuk menjembatani kesenjangan antara sistem formal dan kebutuhan lokal dalam situasi bencana. Dalam konteks Tanah Datar, penyesuaian dalam pengelolaan stok, pemanfaatan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan pengaturan jalur distribusi memperlihatkan bagaimana pelaksana kebijakan merespons kebutuhan yang berkembang selama masa darurat. Praktik tersebut membantu menjaga keberlanjutan penyaluran pangan meskipun kondisi di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme normal yang telah direncanakan.

Meskipun demikian, kemampuan beradaptasi tidak berarti bahwa persoalan kapasitas telah terselesaikan. Kekurangan stok sebesar 75.652 kg, ketergantungan pada pengadaan melalui APBD, serta kerusakan infrastruktur menunjukkan bahwa pengelolaan cadangan pangan daerah masih menghadapi kerentanan struktural. Dengan demikian, adaptasi yang dilakukan selama bencana perlu diikuti penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan persediaan, dukungan pembiayaan, dan kesiapan infrastruktur distribusi. Upaya tersebut penting agar keberhasilan penyaluran pangan tidak hanya bergantung pada inisiatif dan penyesuaian di lapangan, tetapi juga

didukung oleh sistem pengelolaan cadangan pangan yang lebih siap menghadapi bencana berikutnya.

Dengan demikian, kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam pengelolaan cadangan pangan terletak pada kemampuannya mempertahankan fungsi distribusi ketika sumber daya terbatas dan mekanisme normal terganggu. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan cadangan pangan, yang tidak cukup dinilai berdasarkan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga perlu dipahami sebagai proses penyesuaian pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian bencana. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi kebijakan turut ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah merespons perubahan kebutuhan dan mengatasi hambatan yang muncul selama penanganan bencana.

Pemahaman tersebut sejalan dengan literatur mengenai ketahanan rantai pasok pangan dalam situasi bencana yang menekankan pentingnya pengelolaan stok, transportasi, akses penerima, dan koordinasi antarpelaku (Perdana et al., 2022). Kajian mengenai ketahanan sistem pasokan pangan terhadap guncangan mendadak juga menegaskan relevansi kapasitas adaptasi dalam menghadapi gangguan (Huang et al., 2025). Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa ketahanan distribusi pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan persediaan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pasokan menyesuaikan diri ketika terjadi gangguan pada proses penyaluran.

Sementara itu, kajian Bulkis et al. (2026) mengenai kelembagaan ketahanan pangan di Indonesia menyoroti pentingnya hubungan antarlembaga, koordinasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan data dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah rawan krisis. Dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, berbagai perspektif tersebut menjelaskan bahwa keberlanjutan distribusi pangan membutuhkan keterpaduan antara kapasitas sumber daya, fleksibilitas pembiayaan, koordinasi lintas aktor, dan kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan cadangan pangan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan stok, tetapi juga pada pembangunan sistem distribusi yang adaptif dan mampu mempertahankan pelayanan kepada masyarakat ketika bencana mengganggu mekanisme normal.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan kebijakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) perlu diarahkan pada penyesuaian perencanaan stok dengan kebutuhan pangan dan tingkat risiko bencana agar ketersediaan cadangan lebih proporsional. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme pengisian kembali cadangan setelah penyaluran untuk menjaga kesiapan menghadapi bencana berikutnya. Langkah ini penting agar pemenuhan kebutuhan pangan saat keadaan darurat tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam merespons potensi bencana susulan.

Aspek berikutnya adalah penguatan kesiapan pembiayaan darurat melalui pemahaman prosedur pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cepat dan tetap akuntabel. Dari sisi operasional, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pemetaan jalur distribusi alternatif, penentuan titik penyimpanan sementara, dan perencanaan kebutuhan transportasi ke dalam rencana kontingensi bencana. Di samping itu, integrasi data kebutuhan pangan antarlembaga perlu diperkuat untuk mendukung pengambilan keputusan, mengidentifikasi wilayah prioritas, dan memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Selanjutnya, evaluasi bersama setelah bencana perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan stok, pembiayaan, koordinasi, dan distribusi pangan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki prosedur respons dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. Seluruh rekomendasi ini merupakan implikasi analitis yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian dan literatur yang dirujuk, bukan pernyataan bahwa semua langkah tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar.

Secara keseluruhan, kasus Tanah Datar memperlihatkan bahwa adaptasi merupakan bagian penting dari praktik implementasi kebijakan cadangan pangan dalam situasi bencana. Namun, adaptasi yang efektif dan berkelanjutan tetap membutuhkan fondasi kapasitas fiskal, kecukupan stok, koordinasi kelembagaan, dan kesiapan distribusi yang lebih kuat. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, keberlangsungan penyaluran pangan berisiko terus bergantung pada penyesuaian darurat ketika bencana terjadi, alih-alih ditopang oleh sistem kesiapsiagaan yang terencana.

## KESIMPULAN

Pengelolaan cadangan pangan pascagalodo di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok pangan, tetapi juga oleh kemampuan menyesuaikan sumber daya, pembiayaan, koordinasi, dan mekanisme distribusi ketika kondisi normal terganggu. Keterbatasan cadangan pangan, ruang fiskal daerah, serta kerusakan infrastruktur mendorong pemerintah melakukan berbagai bentuk adaptasi untuk mempertahankan penyaluran pangan kepada masyarakat terdampak. Adaptasi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan stok secara antisipatif dengan mempertimbangkan kemungkinan bencana susulan, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan distribusi darurat, mobilisasi aktor lintas sektor dalam pemulihan akses, serta penggunaan infrastruktur sementara dan jalur distribusi alternatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan distribusi pangan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah merespons perubahan kondisi dan menyesuaikan tindakan secara operasional di lapangan.

Meskipun berbagai penyesuaian tersebut memungkinkan fungsi distribusi tetap diupayakan di tengah tekanan bencana, adaptasi tidak serta-merta mengatasi persoalan struktural dalam pengelolaan cadangan pangan daerah. Kesenjangan antara kebutuhan ideal dan stok yang tersedia, ketergantungan pada pembiayaan melalui APBD, serta kerentanan infrastruktur menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan cadangan pangan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan stok, tetapi juga pada penguatan kapasitas fiskal, perencanaan distribusi alternatif, dan pelembagaan koordinasi lintas aktor. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adaptasi merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan cadangan pangan dalam situasi bencana, tetapi keberlanjutan adaptasi tersebut tetap membutuhkan dukungan kapasitas sumber daya, pembiayaan, dan kesiapsiagaan distribusi yang memadai. Kasus Tanah Datar menegaskan bahwa ketahanan pengelolaan cadangan pangan dibangun melalui kombinasi kesiapan sebelum bencana dan kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan cara kerja ketika menghadapi perubahan kondisi di lapangan.

## REFERENSI

- Agustian, A., Sunarsih, S., & Wahyudi, W. (2022). Analisis kebijakan penguatan Cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI*, 6(1), 464-469.
- Astuti, S. J. W., Panglipursari, D. L., Murdani, M. H., Dianto, A. K., & Putra, B. T. (2026). Collaborative governance for food security policy in Indonesia: Lessons for achieving the SDGs in Asia-Pacific. *Development Studies Research*, 13(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/21665095.2026.2674596>

- Boin, A., 't Hart, P., Stern, E., & Sundelius, B. (2017). *The politics of crisis management: Public leadership under pressure* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Bulkis, S., Agussabti, Nugroho, A., Summase, A. P., Mudatsir, R., & Summase, I. (2026). Institutional framework for improving food security in crisis-prone areas in Indonesia. *Journal of Agriculture and Food Research*, 27, Article 102774. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2026.102774>
- Haris, N., Karim, F., & Furqan, A. C. (2023). Disaster risk index on disaster management budgeting: Indonesia's national data set. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 15(1), Article 1365. <https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1365>
- Hecht, A. A., Biehl, E., Barnett, D. J., & Neff, R. A. (2019). Urban food supply chain resilience for crises threatening food security: A qualitative study. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 119(2), 211–224. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2018.09.001>
- Huang, I. Y., Forero, O. A., Wagner-Medina, E. V., Florez Diaz, H., Tremma, O., Fargetton, X., & Lowenberg-DeBoer, J. (2025). Resilience of food supply systems to sudden shocks: A global review and narrative synthesis. *Global Food Security*, 44, Article 100842. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2025.100842>
- Ismail, Ardiansyah, F., Mahyuddin, A. A., Yus, A. R., & Ayuni, N. (2025). Reframing street-level bureaucracy through resilience governance in disaster contexts in Majene Regency. *International Journal of Public Policy and Bureaucracy*, 2(3), 136–159. <https://journal.unm.ac.id/index.php/IJOPAB/article/view/10781>
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lassa, J. A., Teng, P., Caballero-Anthony, M., & Shrestha, M. (2019). Revisiting emergency food reserve policy and practice under disaster and extreme climate events. *International Journal of Disaster Risk Science*, 10, 1–13. <https://doi.org/10.1007/s13753-018-0200-y>
- Ledoh, L., Suroso, D. S. A., Sagala, S., & Suhirman. (2026). Integrating adaptive governance into disaster management planning in medium-sized cities: A case study of Kupang city, Indonesia. *Disaster Prevention and Management*, 35(1), 81–94. <https://doi.org/10.1108/DPM-10-2025-0351>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Bupati Tanah Datar No. 7 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Perdana, T., Onggo, B. S., Sadeli, A. H., Chaerani, D., Achmad, A. L. H., Hermiatin, F. R., & Gong, Y. (2022). Food supply chain management in disaster events: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 78, Article 103123. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103123>

Rojas Trejos, C. A., Meisel, J. D., & Adarme Jaimes, W. (2023). Humanitarian aid distribution logistics with accessibility constraints: A systematic literature review. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 13(1), 26–41. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-05-2021-0041>

Saputra, N., Putera, R. E., Zetra, A., & Azwar, A. (2026). Institutional capacity, organizational performance and multi-stakeholder collaboration in local disaster risk reduction: Evidence from West Sumatra, Indonesia. *Frontiers in Sustainability*, 7, Article 1812663. <https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1812663>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tarei, P. K., Gumte, K. M., Patnaik, J., & Oktari, R. S. (2024). Analysing barriers to humanitarian logistics for distributing relief aid in pre- and post-disaster situations. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 104, Article 104388. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104388>

Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

Wang, S., Wu, Y. J., Zhuang, W., & Zhou, Q. (2026). Emergency logistics network with public–private cooperation and multiple deliveries: An optimization approach. *Transportation Research Record*, 2680(7), 351–372. <https://doi.org/10.1177/03611981251391742>

Wicaksana, F. L. A., & Azhar. (2025). Determination of fiscal dependence and disaster risk on local government unexpected expenditure allocation in Indonesia. *Perspektif*, 14(2), 486–494. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i2.13984>

Wiyanti, A., & Halimatussadiah, A. (2022). Are disasters a risk to regional fiscal balance? Evidence from Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 13, 1–14. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00374-2>

- Zhang, L. (2021). Emergency supplies reserve allocation within government-private cooperation: A study from capacity and response perspectives. *Computers & Industrial Engineering*, 154, Article 107171. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107171>
- Zhang, T., Wang, S., & Xin, X. (2026). Humanitarian relief logistics network design considering facility location, inventory pre-positioning and evacuation planning: A two-stage distributionally robust optimization approach. *Computers & Operations Research*, 189, Article 107390. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2026.107390>